

DAFTAR PUSTAKA

6.1. Buku

- Aartje Tehupeiory, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum dalam Teknik Pengumpulan Data (Wawancara)*, UKI Press, Jakarta 2022.
- Aartje Tehupeiory, *Asas-Asas Hukum Agraria*, UKI Press, Jakarta, 2023.
- Aartje Tehupeiory, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, UKI Press, Jakarta, 2021
- Aartje Tehupeiory, *Monograf Hukum Terhadap Praktek Mafia Tanah*, UKI Press, Jakarta, 2022.
- Aartje Tehupeiory, *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah*, UKI Press, Jakarta 2023.
- Aartje Tehupeiory, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012.
- Aartje Tehupeiory, *Reforma Agraria di Era Globalisasi*, UKI Press, Jakarta, 2023.
- Andy Hartanto, *Hukum Pertanahan: Karakteristik Jual Beli Tnaah yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*, Surabaya Perpustakaan Nasional, 2014.
- Anna Yulianti, *Urgensi Digitalisasi Sistem Pendaftaran Tanah Guna Memberikan Perlindungan Hukum dan Tercapai Kepastian Hukum dalam Kepemilikan Tanah, Alumni Bandung*, Bandung, 2022.
- Arba. H.M dan Mulada Ade. D., *Hukum Hak Tanggungan; Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda di Atasnya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Arie Hutagalung (et.al), *Hukum Pertanahan di belanda dan Indonesia*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012.
- Atmajaya I. G. D. dan Budiarta I. N. P. *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Denpasar, 2018.
- Backy Krisnayuda, *Pancasila dan Undang-Undang: Relasi dan transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.

- Basuki Tjahaya Purnama, *Kebijakan Ahok: Basuki Tjahaya Purnama*, Basuki Solusi Konsultindo, Jakarta, 2018.
- Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Buku Pedoman Tesis, *Pascasarjana Universitas*, Atmajaya, Yogyakarta, 2015.
- Buku Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2016 *Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Kesindo Utama, Surabaya, 2017.
- Deborah Brautigam, *Aid Devendence and Governance*, American Univesity, Washington D. C., 2000.
- Dhaniswara Harjono J., *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, UKI Press, Jakarta, 2021.
- Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Penadilan Khusus Pertanahan*, Gramedia, Jakarta, 2012.
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2022.
- Guntur I G. N. (et.al), *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Proses dan Evaluasi Program Prioritas (Hasil Penelitian Sistematis 2017)*, STPN Press, Yagyakarta, 2017.
- Guntur I Gussi Nyoman, *Modul Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, STPNPress, Yogyakarta, 2014.
- Habib Adjie, *Implementasin Peraturan Pendaftaran Tanah Waris oleh Nortaris*, Refika Aditama, Surabaya, 2022.
- Hajati Sri Sekarmadji Agus (et.al), *Politik Hukum Pertanahan Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2022.

- Huda Nurul Uu, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Fokusmedia, Bandung, 2018.
- I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis*, Setara Press, Malang, 2013.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023.
- Isharyanto, *Politik Hukum*, Kekata Group, Surakarta, 2016 .
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2020.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2021.
- Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, RajaGrafindi Persada, Jakarta, 2012.
- Manotar Tampubolon (et.al), *Hukum dan Teori Konstitusi*, Global Eksekutif Teknologi, Jakarta, 2023.
- Manotar Tampubolon (et.al), *Birokrasi dan Good Governance*, Global Eksekutif Teknologi, Jakarta, 2023.
- Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian*, Global Eksekutif Teknologi, Jakarta, 2023.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UU 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013.
- Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Pasca Sarjana UKI, *Pedoman Penulisan Tesis Tahun Akademik 2022/2023*, UKI Press, Jakarta, 2022.
- Romli Atsasasmita, *"Moral Pancasila, Hukum, dan Kekuasaan"*, Refika Aditama, Bandung, 2020.
- Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2008

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Cetakan Kesembilan*, Citra Aditya Bhakti, Semarang, 2021.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2021.
- Sumarja F. X., *Hukum Pendaftaran Tanah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010.
- Suratman dan Philips Dillah, “*Metode Penelitian Hukum*”, Malang, 2012, hlm 26-27.
- Tambunan A. S. S. *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Perpustakaan Nasional RI Katalog Dalam Terbitan, Jakarta, 2018.
- Tambunan A. S. S., *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Puporis Prublisher, Jakarta, 2002.
- Tjahyo Arianto dan Kuswidarbo, *Modul Praktikum: Praktek Pendaftaran Tanah*, STPNPress, Yogyakarta, 2019.
- Urip Santoso, *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, & Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Urip Sucipto, *Etika Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2012.
- Waskito dan Arnowo Hadi, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2017.
- Yagus Suyadi, *Menuntaskan Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023.
- Yagus Suyadi, *Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023.
- Yudhi Setiawan (et.al), *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktek (dilengkapi dengan beberapa Kasus Pertanahan)*, Rajawali Press, Jakarta, 2017.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2005.

6.2.Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evauasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Konsolidasi Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dan diperbaharui dengan Peraturan/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Petunjuk Teknis Layanan Infomrasi Pertanahan dan Tata Ruang secara Elektronik Nomor 5/Jukni-100.HK.02/VIII/2021, tanggal 9 Agustus 2021.

The National Assembly No. 45/2013/QH13, Vietnam Land Law 2013, Socialist Republic Of Vietnam Independence – Freedom – Happiness.

6.3.Jurnal

Agarwal B. K. IAS (Rtd.), “ Land Title Issues in India, Workshop on Urban Land Governance & Planning National Center for Urban Affairs, LBSNAA, Mussoorie, India Jan22-24, 2020.

- Dian Aries Mujiburohman, Yuridis Dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik, Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol. 7 No. 1 (2021).
- Dwi Wulan Titik Andari, Dian Aries Mujiburohman, Aspek Hukum Layanan Sertipikat Tanah Elektronik, Al'Adl: Jurnal Hukum, Vol. 15 No. 1, (2023).
- Enny Agustina, Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik, jurnal.unpal.ac.id Vol. 19 No 3, (2021).
- Fitrianingsih (*et.al*), Evaluasi Digitalisasi Arsip Pertanahan Dan Peta Bidang Tanah Terintegrasi Menuju Pelayanan Online,” Jurnal Tunas Agraria Vol. 4 No.1 (2021).
- Hamed Olfat and Davood Shojaei, “Modernizing Land Administration systems to Support Sustainable Development Goals - Case Study of Victoria, Australia,” University of Melbourne, Australia, 2021.
- Leonie Newnham (*et.al*), “New Forms For Government Land Administration –Land Victoria, A Case Study Of The Trend Towards Combining Land Administration Functions And The Resulting Benefits To The Community, Melbourne – Australia.
- Novita Riska Ratih, Analisis Yuridis Sertipikat Tanah Hak Milik Elektronik (E-Certificate) Demi Mewujudkan Kepastian Hukum”, (Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam, Malang) hlm 3-12.
- Paul VAN DER MOLEN and Louisa J.M. JANSEN (The Netherlands), “Rural and Urban Land Management; the role of the Netherlands’ government as policy maker and as landowner,” International Land Management Symposium, Session on Policy Requirements and Approaches to Sound Land Management, Hannover, Germany 10-11 Mei 2010.
- Pratiwi Putri Fransiska Purnama, ”Upaya Pemberantasan Mafia Tanah di Kota Palangka Raya”, 24-26 Jurnal Untidar, Vol.4 - No. 1, 2021.

Rudolf Küntzel and Jürg Kaufmann, “The Swiss Approach of Integrated Land Administration and Land Management,” FIG Working Week 2012, Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage, Rome, Italy, 6-10 May 2012.

Suci Febrianti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik”, Indonesian Notary Vol. 3. Art. 9 (2021).

Wowor Fingli A, ”Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah”, *lexprivatum*. Vol.II - No. 2 (2014).

6.4. Website

Agnes Z. Yonatan, “Konsisten adalah: Manfaat, Penerapan, dan Cara Melatihnya, 2022, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6464714/konsisten-adalah-manfaat-penerapan-dan-cara-melatihnya>, [diakses tanggal 24/3/2023, pukul 21.31].

Annisa Fianni Sisma, “Menelaah 5 Maca Pendekatan daam Penelitian Hukum, 2022, <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>, [diakses tanggal 22/3/2024, pukul 7.30].

Artikel.rumah123, ”Panduan Lengkap Tata Cara Biaya dan Syarat Pendaftaran Tanah”, 2022, <https://artikel.rumah123.com/panduan-lengkap-tata-cara-biaya-dan-syarat-pendaftaran-tanah-69391>, [diakses tanggal 23/07/2023, pukul 22.49].

Berita.99.co, ”Mengenal Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Dan Biayanya: Disertai Penjelasan Lengkap!”, 2022, <https://berita.99.co/surat-keterangan-pendaftaran-tanah/>, [diakses tanggal 17/07/2023, pukul 23.20].

Book Futsal, ”Layanan Elektronik”, http://bursa-kerja.ptkpt.net/id4/112-1/Layanan-Elektronik_177336_bursa-kerja-ptkpt.html, [diakses tanggal 14 07/2023, pukul 15.30].

Dezan Shira & Associates, “Land Rights in Vietnam – What They Are and How You Can Acquire Land,” vietnam-briefing.com 25 Juni 2019, terdapat pada <https://www.vietnam-briefing.com/news/land-rights-vietnam-what-they-are-and-how-you-can-acquire-land.html/>, [diakses pada tanggal 21 Februari 2024, pukul 7.12].

DJKN. Kemenkeu. “SKPT dan Urgensinya Dalam Pelaksanaan Lelang”, 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-medan/baca-artikel/14261/SKPT-dan-Urgensinya-Dalam-Pelaksanaan-Lelang.html>, [diakses tanggal 11/07/2023, pukul 20.00].

Eddy Cahyono Sugiarto, Transformasi Birokrasi Menuju Organisasi yang Adaptif, Agile, dan Fluid, Biro Humas Kemensetneg, 25 april 2021, terdapat pada https://www.setneg.go.id/baca/index/transformasi_birokrasi_menuju_organisasi_yang_adaptif_agile_dan_fluid, [diakses pada tanggal 10 /2/2014, pukul 16.25].

Esri Industries, “Netherlands Kadaster: A Foundation For Smart Mapping,” dipublikasikan pada 27 Juni 2020, vidio: 00.00.1.28, tersedia pada <https://www.youtube.com/watch?v=BSiNvotfDbE>, diakses pada tanggal 17/2/2024, pukul 09.08.

Familyresearch, “India Land and Property,” 2022, terdapat pada [https://www.familysearch.org/en/wiki/India Land and Property](https://www.familysearch.org/en/wiki/India_Land_and_Property), [diakses pada tanggal 20/2/2024, pukul 06.35]

Fik/HUMAS MENPANRB, “Strategi Wujudkan Transformasi Pelayanan Publik Iklusif Melalui OGI, menpan.go.id, 7 Februari 2023, terdapat pada <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/strategi-wujudkan-transformasi-pelayanan-publik-inklusif-melalui-ogi>, diakses pada tanggal 6 Februari 2024, pukul 06.31.

Fiska R., “Teknik Pengumpulan Data dalam Rancangan Penelitian, 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/teknik-pengumpulan-data/>, [diakses tanggal 17.3/2024, pukul 08.30].

Harisah Anis, “Sistematika Penulisan, 2020, terdapat pada <https://www.tripven.com/sistematika-penulisan/>, [diakses tanggal 17/3/2024, pukul 15.12].

Junaidi Agus dan Keban Yermias T, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pelayanan Publik Kantor Pertanahan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, 2012, <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/55580>, [diakses tanggal 18/07/2023, pukul 23.10].

Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi, “Profil Negara India,” terdapat pada <https://kemlu.go.id/newdelhi/id/read/profil-negara-india/2228/etc-menu#:~:text=Terletak%20sepenuhnya%20di%20belahan%20bumi,di%20antara%20garis%20bujur%20ekstrem>, [diakses pada tanggal 20/2/2024, pukul 40.50].

Kemenkeu.go.id, “Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria: Penjelasan Umum”, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1960/5TAHUN~1960UUPENJEL.htm>, [diakses tanggal 12/07/2023, 23.10].

KPKNL Madiun, “Bersinergi untuk Memberikan Pelayanan Prima pada Stakeholders, 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-madiun/baca-berita/19844/BERSINERGI-UNTUK-MEMBERIKAN-PELAYANAN-PRIMA-PADA-STAKEHOLDER.html#:~:text=BERSINERGI%20UNTUK%20MEMBERIKAN%20PELAYANAN%20PRIMA%20PADA%20STAKEHOLDER,-Share%3A&text=Sinergi%20berasal%20dari%20bahasa%20Yunani,menghasilkan%20sesuatu%20yang%20optimal>, [diakses tanggal 24/3/2024, pukul 21.04],

Maura Rosita Hafizha, “Mengenal AP itu Teknik Analisa Data, Jenis dan Contohnya,” <https://www.detik.com/bali/berita/d-6548598/mengenal-apa-itu-teknik-analisis-data-jenis-jenis-dan-contohnya>, [dikutip tanggal 17/3/2024, pukul 08.52].

Mohammad haris, “Letak Astronomis Vietnam, Geografis, & Pembagian Administratif,” Gramedia Blog, terdapat pada <https://www.gramedia.com/literasi/luas-pulau-papua-dan-maluku/>, [diakses pada tanggal 22/02/2024 pukul 6.13].

Muhammad Firhansyah, “Aktivasi dan Probem Responsivitas Pengelolaan Website Pemerintah Daerah”, Ombudsman.go.id, 20 Desember 2022, terdapat pada <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--aktivasi-dan-problem-responsivitas-pengelolaan-website-pemerintah-daerah>, diakses pada tanggal 6 Februari 2024, pukul 6.10.

Nina Susilo, Sertipikat Elektronik Diluncurkan, Pemerintah Jamin Lebih Aman, Kompas.id, 4 Desember 2023, terdapat pada, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/12/04/sertipikat-elektronik-diluncurkan-pemerintah-jamin-lebih-aman>, diakses tanggal 28 Desember 2023, pukul 22.08.

Ombudsman RI. “Layanan Sengkarut Sertipikat Berlarut”, 2022 <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--layanan-sengkarutsertipikat-berlarut>, [diakses tanggal 11/07/2023, pukul 20.45].

Rumah.com, ”Mengenal Tanah Ulayat, Hukum Adat, dan Dasar Hukumnya”, 2023, <https://www.rumah.com/panduan-properti/tanah-ulyat-hukum-tanah-adat-53337>, [diakses pada tanggal 13 Juli 2023, pukul 23.00].

Saiful Anam & Partners, Pendekatan Perundang-Undangan (Sattute Approach) dalam Penelitian Hukum, 28 Desember 2017, terdapat pada Saplaw.top, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 30 Desember 2023, pukul 09.16.

Salmaa, Penelitian Empiris: Definisi, Jnis, Ciri, Tujuan dan Contoh, deepublish, 4 April 2023, Terdapat pada <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/>, diakses pada tanggal 18 Januari 2023, Pukul 05.33.

Tim Editor rumah.com, "Apa itu Sengketa Tanah ? Ini Penjelasan dan Contoh Kasusnya di Indonesia", 2023, <https://www.rumah.com/panduan-properti/apa-itu-sengketa-65436>, [diakses tanggal 14/07/2023, pukul 05.30].

Vietnamese Attorney, "Invest in Vietnam," <http://www.vietnamese-attorney.com/en/invest-in-vietnam/vietnam-investment-in-real-estate/vietnam-property-foreign-ownership/>, [diakses pada tanggal 21/2/2024, pukul 7.19].

Wikipedia the free Enciclopedia, "Land registration, 2023, terdapat pada https://en.wikipedia.org/wiki/Land_registration, [diakses pada tanggal 20/2/2024, pukul 04.58].

Wikipedia, "Belanda, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 3 Januari 2024, terdapat pada <https://id.wikipedia.org/wiki/Belanda>, [diakses pada tanggal 14/02/2024, pukul 21.41].

Wikipedia.org, "Komunikasi," 2024, <https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi>, [diakses tanggal 24/3/2024, pukul 21.17].

Willa Wahyuni, "Tata Cara Penggunaan dan Pengajuan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah", 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tata-cara-penggunaan-dan-pengajuan-surat-keterangan-pendaftaran-tanah-lt62862b6fedc6a/>, [diakses tanggal 11/07/2023, pukul 20.00].